

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, secara geografis wilayah Provinsi Banten seluas 9.662,92 km² dengan batas wilayah Provinsi Banten adalah:

- a) Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- b) Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat;
- c) Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia; dan
- d) Sebelah Barat dengan Selat Sunda dan Provinsi Lampung.

Berdasarkan letak geografis dan batas administratif tersebut, maka Provinsi Banten memiliki posisi strategis secara geografis dan secara regional, karena menjadi jalur utama penghubung perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sebagai kesatuan wilayah koridor andalan pengembangan ekonomi nasional. Selain itu, wilayah maritim Banten dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menghubungkan lalulintas laut antara Samudra Hindia ke wilayah Asia.

Secara administratif wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi 4 (empat) daerah otonom Kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang serta 4 (empat) daerah otonom Kota yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya secara rinci terdiri dari 155 kecamatan, dan 1551 desa/kelurahan (1.238 desa dan 313 kelurahan).

Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai sebelah utara melingkar menuju Selat Sunda di sebelah barat.

Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh angin muson dan gelombang la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera hindia dan angin asia di musim penghujan serta angin timur pada musim kemarau. Suhu udara di Banten berkisar antara 22,7°C-32,9°C,

Daerah rawan banjir di Provinsi Banten tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten/Kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Cibeber, Cilegon, Purwakarta, dan Grogol;
- 2) Kota Serang meliputi Kecamatan Kasemen, Cipocokjaya, Serang, dan Walantaka;
- 3) Kota Tangerang meliputi Kecamatan Tangerang, Cipondoh, Batuceper, Ciledug, Jatiuwung, Benda, Karawaci, Cibodas, Periuk, Neglasari, Pinang, Karangtengah, dan Larangan;
- 4) Kota Tangerang Selatan meliputi Kecamatan Serpong, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren;
- 5) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Malingping, Banjarsari, Cimarga, Rangkasbitung, dan Cibadak;
- 6) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Labuan, Pagelaran, Cikedal, Perdana, Patia, Sukaresmi, Panimbang, Pagelaran, Sumur, dan Carita;
- 7) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara, Puloampel, Ciruas, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Tunjungteja, Cikeusal, Pamarayan, Anyer, dan Cinangka.

b. Wilayah Rawan Longsor

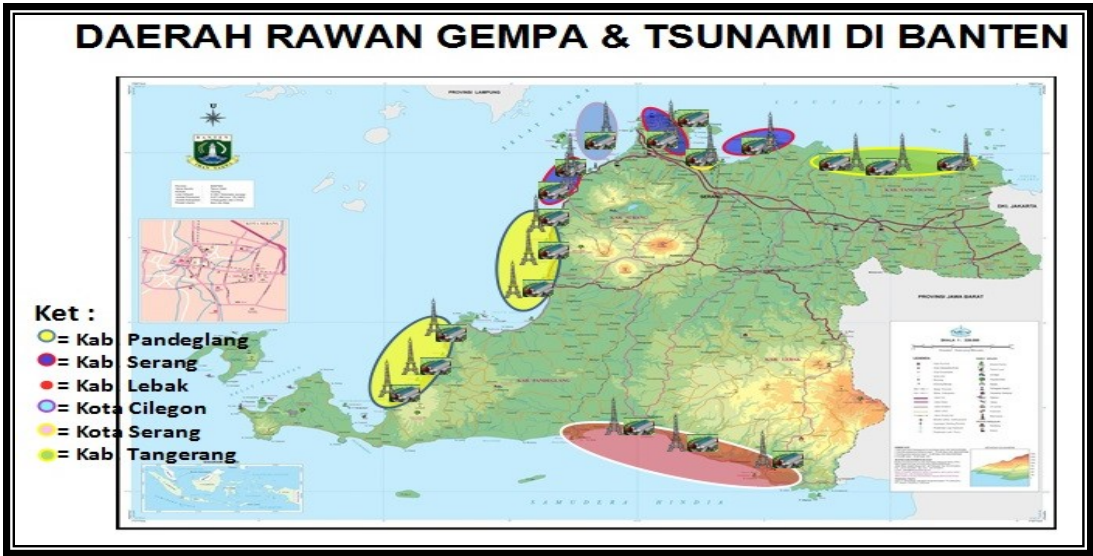
Daerah rawan longsor di Provinsi Banten tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten/kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Pulomerak dan Purwakarta;
- 2) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Bojonegara dan Cikeusal;
- 3) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Cipanas, Muncang, Cibeber, dan Bayah;
- 4) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Pandeglang, Cadasari, dan Mandalawangi.

c. Tsunami

Daerah rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Utara, Barat, sampai Selatan Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya lokasi rawan bencana tsunami di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2
Peta Daerah Rawan Gempa dan Tsunami di Banten



4. Demografi

Kondisi Demografi Banten secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah Penduduk Banten tahun 2017 mencapai 12.448.160 jiwa, Banten menduduki Peringkat ke-5 Nasional, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.01 persen menurun sebesar 0.06% bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2016, kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2015-2017

Kab/Kota	2015	2016	2017
Kabupaten Pandeglang	1.194.911	1.200.512	1.205.203
Kabupaten Lebak	1.269.812	1.279.412	1.288.103
Kabupaten Tangerang	3.370.594	3.477.495	3.584.770
Kabupaten Serang	1.474.301	1.484.502	1.493.591
Kota Tangerang	2.047.105	2.093.706	2.139.891
Kota Cilegon	412.106	418.705	425.103
Kota Serang	643.205	655.004	666.600
Kota Tangsel	1.543.209	1.593.812	1.644.899
Provinsi Banten	11.955.243	12.203.148	12.448.160

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2018

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2017

Kab/Kota	Jumlah Penduduk								
	2015			2016			2017		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kabupaten Pandeglang	610.412	584.499	1.194.911	613.108	587.404	1.200.512	615.297	589.906	1.205.203
Kabupaten Lebak	650.912	618.900	1.269.812	655.607	623.805	1.279.412	659.796	628.307	1.288.103
Kabupaten Tangerang	1.724.915	1.645.679	3.370.594	1.779.102	1.698.393	3.477.495	1.833.470	1.751.300	3.584.770
Kabupaten Serang	747.808	726.493	1.474.301	752.703	731.799	1.484.502	757.089	736.502	1.493.591
Kota Tangerang	1.045.113	1.001.992	2.047.105	1.068.606	1.025.100	2.093.706	1.091.787	1.048.104	2.139.891
Kota Cilegon	210.505	201.601	412.106	213.803	204.902	418.705	217.000	208.103	425.103
Kota Serang	329.806	313.399	643.205	335.803	319.201	655.004	341.597	325.003	666.600
Kota Tangsel	777.713	765.496	1.543.209	802.908	790.904	1.593.812	828.392	816.507	1.644.899
Provinsi Banten	6.097.184	5.858.059	11.955.243	6.221.640	5.981.508	12.203.148	6.344.428	6.103.732	12.448.160

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten
Tahun 2015-2017

Kab/Kota	2015	2016	2017
Kabupaten Pandeglang	0,55	0,47	0,39
Kabupaten Lebak	0,83	0,76	0,68
Kabupaten Tangerang	3,24	3,17	3,08
Kabupaten Serang	0,77	0,69	0,61
Kota Tangerang	2,36	2,28	2,21
Kota Cilegon	1,68	1,60	1,53
Kota Serang	1,92	1,83	1,77
Kota Tangsel	3,36	3,28	3,21
Provinsi Banten	2,14	2,07	2,01

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2018

Persebaran penduduk Provinsi Banten tidak merata, karena sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah 1.312,98 Km² (14% dari luas wilayah Provinsi Banten), ketiga wilayah tersebut pada tahun 2017 dihuni oleh sekitar 57,98% dari jumlah penduduk Banten meningkat 4.78% jika dibandingkan pada tahun 2016. Sedangkan 42,02% penduduk tersebar di 5 (lima) wilayah yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi tidak merata. Tercatat, Kota Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 13.008 jiwa per km². Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten

Lebak yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 375 jiwa per km². Berarti, Kota Tangerang hampir 35 kali lebih padat bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebak.

Berdasarkan data Sosial Ekonomi BPS Provinsi Banten, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha pada Tahun 2017, sebagaimana grafik dan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Banten Tahun 2017

No.	Kab/Kota	Jumlah (ribu)	Persentase
1.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	676	13,31
2.	Pertambangan dan Penggalian	37	0,74
3.	Industri	1.246	24,54
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	21	0,41
5.	Konstruksi	286	5,62
6.	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	1.204	23,71
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	375	7,38
8.	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Js Perusahaan	333	6,56
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	900	17,73
Total		5.077	100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten 2017

Adapun rincian penduduk berdasarkan Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Banten Tahun 2015 - 2017 sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5
Indikator Ketenagakerjaan
Provinsi Banten Tahun 2015 - 2017

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun		
			Agst 2015	Agst 2016	Agst 2017
1	Angkatan Kerja	Juta Orang	5,33	5,59	5,60
	a. Bekerja	Juta Orang	4,83	5,09	5,08
	b. Pengangguran Terbuka	Juta Orang	0,51	0,50	0,52
2	Bukan Angkatan Kerja	Juta Orang	3,24	3,19	3,38
3	Penduduk Usia Kerja	Juta Orang	8,57	8,78	8,98
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,24	63,66	62,32

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun		
			Agst 2015	Agst 2016	Agst 2017
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,55	8,92	9,28

Sumber : BPS Provinsi Banten 2017

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja pembangunan dengan fokus kesejahteraan secara umum bisa dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, indeks gini ratio, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, dan lain-lain.

LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten pada tahun 2017 sebagaimana pada Tabel berikut ini:

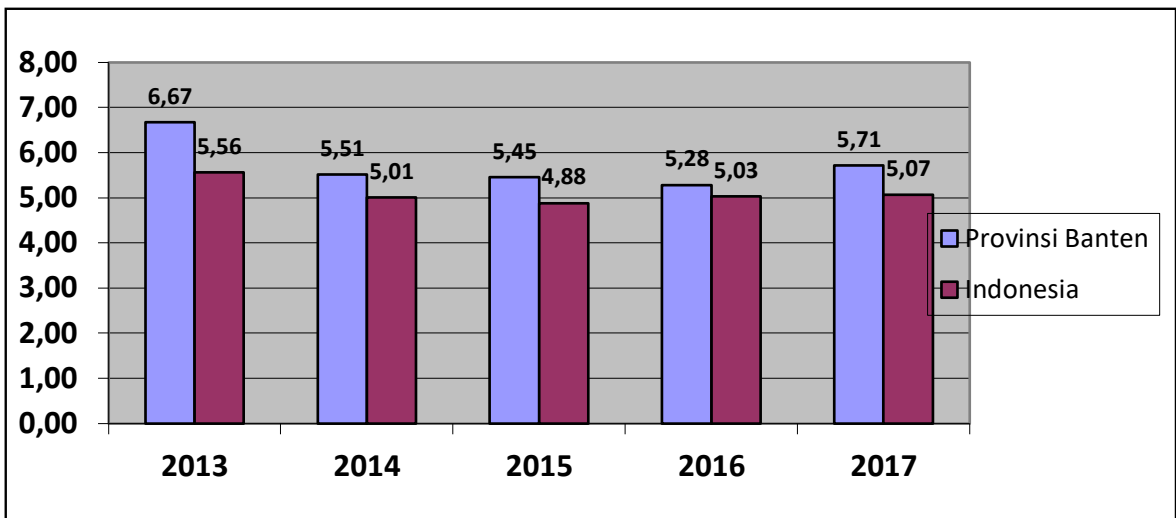
Tabel 2.6
Perkembangan LPE Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2013 - 2017 (Persen)

Kab/Kota	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017*
Kabupaten Pandeglang	4,72	4,93	5,96	5,49	5,64
Kabupaten Lebak	6,30	5,83	5,80	5,70	5,85
Kabupaten Tangerang	6,41	5,37	5,36	5,32	5,87
Kabupaten Serang	6,04	5,39	5,02	5,00	5,52
Kota Tangerang	6,52	5,15	5,37	5,30	5,84
Kota Cilegon	6,69	4,62	4,78	5,05	5,57
Kota Serang	7,30	6,86	6,29	6,22	6,73
Kota Tangerang Selatan	8,75	8,05	7,20	6,98	7,55
Provinsi Banten	6,67	5,51	5,45	5,28	5,71
Indonesia	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2017

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten dibandingkan dengan LPE Nasional Tahun 2013 – 2017, sebagaimana grafik di bawah ini:

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Provinsi Banten, BDA Provinsi Banten Tahun 2017.

LPE tidak akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat bila diimbangi juga dengan tingginya laju inflasi. Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa. Perkembangan laju inflasi menurut kelompok pengeluaran di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Perkembangan Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
di Provinsi Banten Tahun 2015-2017 (%)

NO	KELOMPOK PENGELUARAN	2015	2016	2017
1	Bahan Makanan	3,82	6,93	1,13
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	8,18	5,07	5,53
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	4,56	0,97	5,21
4	Sandang	1,90	1,70	2,26
5	Kesehatan	12,78	2,86	3,31
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	6,05	2,21	6,51
7	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-2,20	-1,92	3,67
	Umum	4,29	2,94	3,98

Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2017

PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Perkembangan PDRB salah satunya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor ekonomi di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Triliun Rp)

Lapangan Usaha (1)	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	Tri IV-2016 (2)	Tri III-2017 (3)	Tri IV-2017 (4)	Tri IV-2016 (5)	Tri III-2017 (6)	Tri IV-2017 (7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,71	8,86	7,32	5,43	6,14	5,03
B. Pertambangan dan Penggalian	1,02	1,05	1,04	0,72	0,72	0,71
C. Industri Pengolahan	43,20	45,22	46,36	35,44	36,09	36,80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,88	2,99	3,08	1,03	1,05	1,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,12	0,09	0,10	0,10
F. Konstruksi	14,37	15,20	16,31	9,81	10,13	10,74
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,17	17,71	17,98	13,08	13,88	14,00
H. Transportasi dan Pergudangan	14,54	15,66	16,67	6,45	6,94	7,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,18	3,42	3,51	2,35	2,50	2,56
J. Informasi dan Komunikasi	4,74	5,29	5,30	5,48	5,95	5,96
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,10	4,28	4,46	2,96	3,01	3,10
L. Real Estate	9,57	10,79	10,91	8,20	8,83	8,92
M,N. Jasa Perusahaan	1,40	1,55	1,58	0,99	1,06	1,07
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,70	2,91	2,97	1,72	1,80	1,81
P. Jasa Pendidikan	4,32	4,78	4,99	2,90	3,08	3,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,55	1,71	1,76	1,17	1,24	1,27
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,11	2,29	2,36	1,44	1,53	1,57
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	133,66	143,83	146,72	99,27	104,05	104,97

Sumber: BPS Provinsi Banten
No.12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Tabel 2.10
 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Banten
 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	Triw III-2017 terhadap Triw II-2017	Triw IV-2017 terhadap Triw III-2017	Triw III-2017 terhadap Triw III-2016	Triw IV-2017 terhadap Triw IV-2016	Kumulatif Triw IV-2017 terhadap Triw IV-2016	Sumber Pertumbuhan Triw IV-2017 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,17	(18,16)	4,12	(7,34)	4,12	(0,40)
B. Pertambangan dan Penggalian	3,04	(1,21)	(0,23)	(1,95)	(0,68)	(0,01)
C. Industri Pengolahan	0,79	1,96	2,54	3,83	3,70	1,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,29	2,50	5,18	4,90	0,50	0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,09	0,66	8,24	8,37	7,30	0,01
F. Konstruksi	7,77	6,04	8,78	9,46	8,03	0,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,49	0,83	6,58	6,98	6,15	0,92
H. Transportasi dan Pergudangan	2,52	2,62	9,17	10,37	8,57	0,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,29	2,24	8,54	8,69	8,28	0,21
J. Informasi dan Komunikasi	3,09	0,23	8,77	8,77	8,42	0,48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,29	2,97	2,84	4,67	3,81	0,14
L. Real Estate	3,23	1,03	8,77	8,82	7,92	0,73
M,N. Jasa Perusahaan	2,52	0,87	9,06	8,39	7,91	0,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,47	0,66	4,96	5,36	4,58	0,09
P. Jasa Pendidikan	0,76	2,07	8,24	8,28	7,42	0,24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,21	2,46	8,54	8,76	7,94	0,10
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,36	2,48	8,49	8,90	8,14	0,13
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2,41	0,89	5,63	5,75	5,71	5,75

Sumber: BPS Provinsi Banten
 No.12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

2. Fokus Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah dengan fokus kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat yang tercermin dari IPM.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat

digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Ratarata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Dengan paritas daya beli dihitung menurut harga-harga yang berlaku di Provinsi Banten, sehingga nilai Pengeluaran per kapita disesuaikan ini memiliki keterbandingan dengan daerah lainnya.

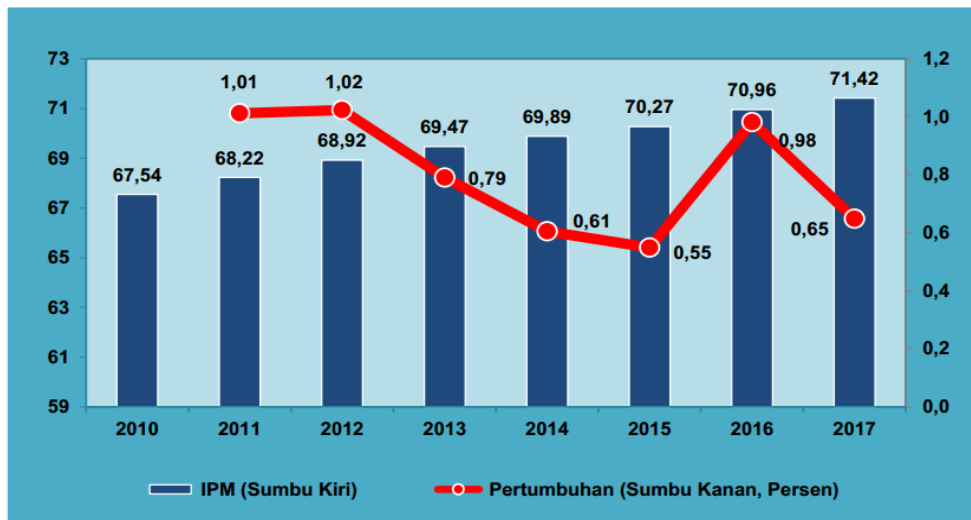
IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

a. Perkembangan IPM Banten 2010-2017

Perkembangan IPM di Provinsi Banten 2010-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten
Tahun 2010–2017



Sumber: BPS Provinsi Banten
No.22/04/36/Th.XII, 16 April 2018

Secara umum pembangunan manusia Banten selama tujuh tahun terakhir ini, terus mengalami kemajuan. Dimana, IPM Banten meningkat dari 67,54 pada tahun 2010 menjadi 71,42 pada tahun 2017 menjadikan Banten menduduki peringkat 8 Nasional. Hanya saja, pertumbuhan atau kecepatan kemajuannya pada tahun 2017 ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 1). Selain itu, status pembangunan manusianya masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

b. Pencapaian Kapabilitas Manusia

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Banten Menurut Komponen
Tahun 2010–2017

Komponen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH, Tahun)	68,50	68,68	68,86	69,04	69,13	69,43	69,46	69,49
Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	11,02	11,41	11,79	12,05	12,31	12,35	12,70	12,78
Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	7,92	7,95	8,06	8,17	8,19	8,27	8,37	8,53
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10.777	10.933	11.008	11.061	11.150	11.261	11.469	11.659
IPM	67,54	68,22	68,92	69,47	69,89	70,27	70,96	71,42
Pertumbuhan IPM (Persen)	-	1,01	1,02	0,79	0,61	0,55	0,98	0,65

Sumber: BPS Provinsi Banten
No.22/04/36/Th.XII, 16 April 2018

- c. Pencapaian Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota
- Pencapaian pembangunan manusia di kabupaten/kota pada tahun 2017 terlihat cukup bervariasi, dengan IPM tertinggi menjadi milik Kota Tangerang Selatan (80,84) dan terendah untuk Kabupaten Lebak (62,95). Kota Tangerang Selatan juga menjadi pemilik nilai tertinggi untuk setiap dimensi/komponen pembentuk IPM, sedangkan nilai terendah diduduki secara bergantian oleh Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, seperti ditampilkan pada tabel 2.15 dibawah ini:

Tabel 2.13
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Banten Menurut
Kabupaten/Kota
Tahun 2016–2017

Kabupaten/ Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)		IPM		
									Capaian		Pertum- buhan (Persen)
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pandeglang	63,77	64,04	13,40	13,41	6,62	6,63	8.138	8.358	63,40	63,82	0,66
Lebak	66,43	66,59	11,91	11,92	6,19	6,20	8.308	8.372	62,78	62,95	0,27
Tangerang	69,37	69,47	12,11	12,51	8,23	8,24	11.863	11.914	70,44	70,97	0,75
Serang	63,81	64,02	12,37	12,38	6,98	7,17	10.317	10.466	65,12	65,60	0,74
Kota Tangerang	71,34	71,38	13,41	13,44	10,28	10,29	13.911	14.104	76,81	77,01	0,26
Kota Cilegon	66,24	66,32	13,11	13,12	9,68	9,69	12.326	12.562	72,04	72,29	0,35
Kota Serang	67,36	67,38	12,63	12,64	8,60	8,61	12.660	12.914	71,09	71,31	0,31
Kota Tangsel	72,14	72,16	14,08	14,39	11,58	11,77	14.972	15.291	80,11	80,84	0,91
Banten	69,46	69,49	12,70	12,78	8,37	8,53	11.469	11.659	70,96	71,42	0,65

Sumber: BPS Provinsi Banten
No.22/04/36/Th.XII, 16 April 2018

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 64,04 tahun (Kabupaten Pandeglang) hingga 72,16 tahun (Kota Tangerang Selatan). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,92 tahun (Kabupaten Lebak) hingga 14,39 tahun (Kota Tangerang Selatan), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 6,20 tahun (Kabupaten Lebak) hingga 11,77 tahun (Kota Tangerang Selatan). Adapun, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di berkisar antara 8,4 juta rupiah per tahun (Kabupaten Pandeglang) hingga 15,3 juta rupiah per tahun (Kota Tangerang Selatan).

Selain dari sisi pencapaian, variasi juga terlihat dari kecepatan atau pertumbuhan IPM nya. Tercatat, Kota Tangerang Selatan tumbuh 0,91 persen, sehingga menjadi daerah yang pembangunan manusianya pada tahun 2017 mengalami kemajuan paling pesat. Kemajuannya itu didorong oleh cepatnya perbaikan pada dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Sementara yang paling lambat adalah Kota Tangerang, yang lebih banyak dipengaruhi oleh lambatnya perbaikan pada dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan.

d. Perbandingan Regional

Pencapaian pembangunan manusia Banten selama setahun terakhir ini masih lebih baik dibandingkan DKI Jakarta. Kondisi yang demikian ditandai oleh pertumbuhan angka IPM nya yang menempati urutan kelima di Jawa. Hanya saja, kecepatannya itu ternyata masih di bawah rata-rata Nasional yang mencapai 0,90 persen. Namun demikian, besaran angka dan peringkat IPM Banten, hanya kalah dari DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Betapapun juga, bila besaran angka dan peringkat IPM Banten tidak ingin dilampaui oleh provinsi lain, harus dilakukan perbaikan pada beberapa dimensi/komponen pembentuk. Pertama, capaian pada dimensi umur panjang dan hidup sehat harus diperbaiki kembali. Hal ini karena, capaiannya bukan saja berada pada peringkat terbawah di Jawa, bahkan masih lebih rendah dari rata-rata Nasional.

Kedua, capaian pada dimensi pengetahuan, khususnya pada komponen Harapan Lama Sekolah, harus terus ditingkatkan. Hal ini karena dalam jangka panjang, capaiannya tersebut dapat mempengaruhi capaian komponen Ratarata Lama Sekolah. Capaian

Harapan Lama Sekolah Banten sendiri masih berada di peringkat keempat dan lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional. Dengan demikian, dalam jangka panjang terbuka peluang, terutama bagi Jawa Barat untuk meninggalkan Banten.

Tabel 2.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Regional se Jawa Menurut Komponen Tahun 2017

Provinsi	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	IPM		Peringkat Nasional
					Nilai	Pertum- buhan (Persen)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DKI Jakarta	72,55	12,86	11,02	17.707	80,06	0,58	1
BANTEN	69,49	12,78	8,53	11.659	71,42	0,65	8
Jawa Barat	72,47	12,42	8,14	10.285	70,69	0,91	10
Jawa Tengah	74,08	12,57	7,27	10.377	70,52	0,77	13
DI Yogyakarta	74,74	15,42	9,19	13.521	78,89	0,65	2
Jawa Timur	70,80	13,09	7,34	10.973	70,27	0,76	15
Indonesia	71,06	12,85	8,10	10.664	70,81	0,90	-

Sumber: BPS Provinsi Banten
No.22/04/36/Th.XII, 16 April 2018

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan pemerintahan daerah.

Fokus layanan urusan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada:

1. Urusan Wajib Pendidikan

Kualitas penduduk Banten sendiri sepanjang periode 2013-2015 meningkat cukup pesat. Hal ini dapat diketahui dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (RLS) dan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan S1/DIV/S2/S3 (APT), hingga mencapai 8,3 tahun dan 5,8% pada tahun 2015. Bahkan, kualitas penduduk Banten ini secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan Nasional, yang memiliki RLS dan APT hanya 7,8 tahun dan 5,6%. Kualitas penduduk Banten yang meningkat ternyata

didorong oleh semakin luasnya akses penduduk terhadap pendidikan. Hal ini ditandai oleh angka partisipasi sekolah (APS) untuk berbagai kelompok usia yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, masih rendahnya APS kelompok usia 16-18 tahun, harus mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Hal ini karena dengan nilai APS yang hanya 66,73 persen, berarti ada sekitar sepertiga penduduk Banten usia 16-18 tahun, yang pada tahun 2015 tidak bersekolah lagi.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Capaian Banten dalam bidang kesehatan dalam dua tahun terakhir telah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kondisi ini terlihat dari Angka harapan hidup (AHH) yang terus meningkat hingga mencapai 69,4 tahun pada tahun 2015. Hanya saja, angka kesakitan yang diukur dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, pada periode yang sama juga meningkat hingga menjadi 30,3 persen. Selain itu, rata-rata lama sakit dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan juga naik dari 4,9 hari menjadi 5,6 hari.

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan diantaranya adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain:

- a) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan;
- b) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan, dan apoteker;
- c) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Tercatat, jumlah sarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas pada tahun 2015 masing-masing sebanyak 88 unit dan 233 unit. Kedua sarana kesehatan tersebut secara total didukung oleh 4.439 dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis, serta 4.949 bidan dan 8.072 perawat.

3. Urusan Wajib Perumahan

Berdasarkan data yang ada, sekitar 81% rumah tangga di Banten pada tahun 2015 ini sudah menempati rumah milik sendiri. Artinya, kepemilikan rumah oleh rumah tangga sudah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (77,48% pada tahun 2013 dan 77,96% pada tahun 2015). Namun, luas rumah yang baru ditempati kebanyakan justru lebih sempit. Kondisi yang demikian setidaknya tercermin dari naiknya persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita maksimal tujuh meter persegi. Kondisi fisik rumah yang ditempati pada tahun 2015 terlihat banyak mengalami perbaikan. Hal ini diketahui dari bertambahnya persentase rumah tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah dan berdinding dari tembok. Sementara itu sumber air minum bersih dan sanitasi layak merupakan salah satu fasilitas perumahan yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun keberadaan keduanya ternyata masih menjadi masalah yang kronis bagi sebagian penduduk Banten. Tercatat, sampai tahun 2015 ini setidaknya masih ada tiga dari sepuluh rumah tangga yang belum mempunyai akses terhadap kedua fasilitas perumahan tersebut. Bahkan untuk fasilitas sanitasi layak, persentase rumah tangga yang mampu mengaksesnya justru mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Luas kawasan hutan saat ini tercatat 208.161,27 Ha atau 24,06% terhadap luas provinsi di Banten, namun demikian hasil pencitraan satelit luas vegetasi tutupan lahan masih 29,3%. Padahal amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas tutupan lahan seharusnya 30% dari luas wilayah. Lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis di Banten mencapai 104.103,01 Ha atau 12% dari luas wilayah. Mengalami penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis sebelumnya yaitu 117.914,00 Ha. Penurunan luas lahan kritis tersebut disebabkan oleh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan

lahan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

5. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Persentase keluarga yang memiliki/menguasai jasa layanan telepon kabel cenderung mengalami penurunan yang hanya mencapai 7,84% pada tahun 2014 sedangkan persentase keluarga yang memiliki/menguasai jasa layanan telepon seluler cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 90,05 pada tahun 2014. Beberapa daerah perkotaan pada tahun 2010 angka teledensitasnya sudah tinggi (>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah, terutama untuk jaringan telekomunikasi perdesaan. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (selular). Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui program Kemampuan Pelayanan Universal (KPU)/ *Universal Service Obligation (USO)* yang digagas oleh pemerintah pusat sebanyak 40 USO.

6. Urusan Wajib Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian

Provinsi Banten secara administratif terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, dan 4 (empat) kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang, dan Tangerang Selatan. Adapun jumlah kecamatan di seluruh Banten sebanyak 155, sedangkan jumlah desa dan Kelurahan menjadi 1.551.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten pada Maret Tahun 2017 sebanyak 10.734 Orang, jumlah laki-laki sebanyak 5.723 orang dan perempuan sebanyak 4.651 orang.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel

diperlukan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melayani masyarakat.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

1. Urusan Wajib Perhubungan

Secara geografis, Banten terletak pada jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga ketersediaan jalan menjadi faktor yang sangat strategis. Pada tahun 2013 Provinsi Banten telah terlayani oleh ketersediaan jaringan jalan (jalan Nasional dan jalan Provinsi) sepanjang 1.329,38 KM. Total panjang jalan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/Kpts/M/2009 adalah 476,49 KM dan total panjang jalan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011 tanggal 8 Desember 2011 adalah 852,89 KM.

Wilayah Banten menjadi jalur penghubung darat yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Oleh karena itu, ketersediaan jalan dalam kondisi baik menjadi faktor yang sangat strategis. Di Banten sendiri, pada tahun 2015 ini tersedia jalan utama sepanjang 6.907 KM, yang terdiri dari 565 KM jalan nasional dan 853 KM jalan Provinsi, serta 5.489 KM jalan Kabupaten/Kota. Namun demikian, ketersediaan jalan dengan kondisi yang baik kemungkinan kurang dari separuhnya. Hal ini setidaknya dapat diketahui dari persentase panjang jalan Nasional dan Provinsi dalam kondisi baik yang pada tahun 2014 hanya sebesar 37 persen saja.

Di Banten, terdapat 21 stasiun kereta api yang menghubungkan Stasiun Merak dengan Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Jakarta Kota. Jumlah penumpang yang diangkut di beberapa stasiun KA yaitu Stasiun Merak, Cilegon, Cigading, Serang, Rangkasbitung, dan Stasiun Serpong pada tahun 2015 mencapai 4,9 juta orang, atau meningkat 0,5 juta orang dibandingkan tahun 2014. Hanya saja, jumlah barang yang diangkut mengalami penurunan dari 498 ribu ton menjadi 452 ribu ton.

Matra yang paling banyak digunakan dalam menunjang transportasi dari dan ke Provinsi Banten yang menjadi penghubung antar daerah di

Provinsi Banten adalah transportasi darat. Hal ini karena, darat merupakan matra yang paling mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangan dengan berbagai keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itu tingkat pelayanan prasarana jalan menjadi sangat vital kedudukannya dan menjadi salah satu barometer yang menentukan keberhasilan pertumbuhan pembangunan di Provinsi Banten. Ketersediaan terminal yang memiliki Tipe A sebanyak 3 unit, Tipe B sebanyak 6 unit, dan terminal tipe C 10 unit. Selain itu terdapat juga 3 UPT pemeriksaan dan penimbangan kendaraan bermotor.

Untuk melayani pergerakan barang dan penumpang secara umum sistem jaringan jalan Provinsi Banten menggunakan pola cincin yang melingkar dari wilayah Utara sampai ke wilayah Selatan yang dihubungkan secara radial dengan jaringan jalan vertikal Utara-Selatan dan secara horizontal Timur-Barat. Konsep jaringan “ring-radial” dimaksudkan agar pergerakan penumpang dan barang dari pesisir menuju ke pusat kegiatan Nasional, wilayah maupun lokal yang ada pada bagian tengah wilayah dapat dicapai dengan mudah. Pada saat ini jaringan jalan cincin bagian Barat dan Selatan sudah ditingkatkan statusnya menjadi jalan Nasional. Sementara pada bagian utara masih berstatus sebagai jalan Provinsi. Jalan horizontal timur-barat dilayani oleh jalan Nasional serta jalan tol Jakarta-Merak dengan panjang lebih dari 90 Km, sedangkan jalan vertikal utara-selatan dilayani dengan jalan Provinsi. Jalan Kabupaten/Kota melayani akses ketiga jalan itu.

Banten juga memiliki 4 (empat) bandara udara yaitu Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Udara Budiarto Curug, Bandara Udara Pondok Cabe, dan Lapangan Terbang Gorda. Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara udara terbesar di Indonesia dan menjadi pintu utama keluar-masuk internasional bagi Indonesia. Hanya saja Intensitas kegiatan transportasi udara pada bandara ini selama periode 2013-2015 terlihat agak menurun. Kondisi ini dapat diketahui dari turunnya total jumlah penerbangan dan penumpang domestik serta internasional dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, total jumlah kargo pada periode yang sama meningkat dari 368 ribu ton menjadi 374 ribu ton.

Pelabuhan Merak merupakan pelabuhan penyeberangan tersibuk di Indonesia, yang menghubungkan dua pulau besar yaitu Jawa dan Sumatera. Lalu lintas penyeberangannya, selama periode 2013-2015 terasa semakin padat. Kondisi ini setidaknya terlihat dari jumlah trip penyeberangan yang meningkat hingga menjadi 34 ribu trip. Di sisi lain, jumlah penumpang dan kendaraan yang diangkut juga menurun, masing-masing dari 1,40 juta orang dan 2,01 juta unit kendaraan menjadi 1,27 juta orang dan 2,00 unit kendaraan.

2. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten cenderung fluktuatif. Pada Februari 2014 mencapai 66,47%, kemudian mengalami penurunan pada Agustus 2014 sebesar 63,84 dan kembali meningkat pada Februari 2015 sebesar 67,28%. Pada tahun 2013, Kota Tangerang memiliki TPAK tertinggi 68,02%, sedangkan Kabupaten Pandeglang memiliki TPAK terendah (58.74%). Namun demikian pada tahun 2013 TPAK Kabupaten Pandeglang menjadi yang terendah yang hanya sebesar 58,25% sedangkan pada posisi tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Lebak yaitu sebesar 71,40%.

Dilihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Provinsi Banten hanya sebesar 85,87%, padahal di provinsi lainnya minimal 88,68%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terlihat semakin menurun, dari 13,06% di tahun 2011 menjadi 10,74% pada 2012 menjadi 9,9% pada tahun 2013 dan pada februari 2014 menjadi 9,87%, kemudian mengalami penurunan lagi pada bulan Februari 2015 menjadi 8,58%.

Upah minimum memiliki peranan penting dalam masalah tenaga kerja. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan UMK yang sangat besar khususnya untuk daerah industri, seperti di Kabupaten Serang dari Rp1.320.500,00 pada tahun 2012 menjadi Rp2.080.000,00 pada tahun 2013 menjadi Rp2.340.000,00 pada tahun 2014 dan menjadi Rp2.700.000,00 pada tahun 2015. Secara rata-rata UMK di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari Rp1.170.000,00 pada tahun 2013 menjadi Rp1.325.000,00 pada tahun 2014 dan menjadi Rp1.600.000,00 pada tahun 2015.

Bila diperhatikan menurut komposisi lapangan pekerjaan utama, sektor industri pengolahan mendominasi jumlah penyerapan tenaga

kerja yaitu sebesar 26,23%, sedangkan pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 23,79% disusul kemudian oleh sektor jasa-jasa 18,23%, sektor pertanian sebesar 12,46%, dan sektor lainnya 19,28%.

3. Urusan Pilihan Pertanian

Sebagai produsen beras terbesar kesebelas di Indonesia, padi menjadi tanaman yang telah ditanam di seluruh wilayah Banten. Akan tetapi, sentra produksinya hanya terletak pada empat wilayah kabupaten, yaitu Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang. Produksi padi Banten sendiri pada tahun 2015 mencapai 2,19 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 0,14 juta ton GKG dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi padi ini disebabkan oleh luas panen yang bertambah dan produktivitas yang meningkat. Luas panen bertambah karena adanya perbaikan pada jaringan irigasi tersier, pembuatan embung, dan program pompanisasi.

Adapun produktivitas tanaman yang meningkat, selain dipengaruhi oleh kondisi iklim, juga disebabkan oleh penerapan sistem penanaman jagor legowo serta penggunaan bibit unggul bersertifikat dan pupuk bantuan pemerintah, antara lain melalui program upaya khusus. Seperti padi, tanaman palawija juga ditanam di seluruh wilayah Banten, dengan sentra produksi terutama di Kabupaten Serang dan Pandeglang. Peningkatan/penurunan produksi tanaman palawija pada tahun 2015 umumnya disebabkan oleh penambahan/penurunan luas panen. Produksi tanaman palawija terbanyak dipegang oleh tanaman ubi kayu, sedangkan yang paling sedikit adalah tanaman kacang hijau. Adapun produktivitas tanaman tertinggi dan terendah, juga dipegang oleh tanaman ubi kayu dan tanaman kacang hijau, dengan tingkat produktivitas masing-masing sebanyak 178 kw/ha dan 8 kw/ha.

4. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2014, di Provinsi Banten terdapat 6.623 rumah tangga perikanan tangkap, dimana 6.065 rumah tangga atau 91,57 persen diantaranya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di laut, sementara sisanya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di perairan umum. Total produksi perikanan tangkap selama tahun 2014

sebesar 59.538 ton, dimana 59.102 ton atau 99,27 persen diantaranya dihasilkan dari perikanan tangkap di laut. Selain itu, di Provinsi Banten juga terdapat 25.169 rumah tangga perikanan budidaya, dengan total produksi sebesar 105.635 ton. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya terbesar terdapat di Kabupaten Lebak yaitu sebanyak 11.391 rumah tangga, sementara untuk jumlah produksi terbesar dicapai oleh Kabupaten Serang yaitu sebesar 68.355 ton.

5. Urusan Pilihan Pertambangan dan Energi

Sektor energi listrik Banten menjadi salah satu sektor strategis, yang bukan saja untuk Banten, tapi juga bagi Jawa dan Bali. Kondisi yang demikian itu dapat terjadi karena dari sisi *supply*, Banten memiliki pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik interkoneksi Jawa-Bali. Pembangkit listrik tersebut adalah PTLU Suralaya dan PT Krakatau Daya Listrik (Kota Cilegon), PLTGU Bojonegara (Kabupaten Serang), PLTU Lontar (Kabupaten Tangerang), dan PLTU Labuan (Kabupaten Pandeglang). Kapasitas terpasang seluruh pembangkit listrik di Banten sendiri terus meningkat, yakni dari 11,3 ribu MW pada tahun 2012 menjadi 12,9 ribu MW pada tahun 2014. Seiring dengan itu, jumlah unit pembangkit listriknya juga mengalami kenaikan. Akibatnya, jumlah energi listrik yang dibangkitkan bertambah hingga mencapai 63,7 ribu GWh. Dari sisi *demand*, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten sangat unik. Hal ini karena penjualannya dilakukan oleh dua distributor, yaitu PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang serta PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Tingkat efisiensi distribusi listrik PLN-nya terlihat semakin memburuk, karena persentase energi listrik yang susut selama proses distribusi mengalami kenaikan dari 10% pada tahun 2014 menjadi 11% persen pada tahun 2015. Sementara jumlah energi listrik yang terjual pada tahun 2015 justru mengalami penurunan hingga menjadi 18,6 juta MWh. Sekitar dua per tiga dari energi listrik yang terjual ini, ternyata dibeli oleh perusahaan/usaha dari kalangan industri pengolahan. Adapun pelanggan rumah tangga yang jumlahnya jauh lebih banyak, hanya mengkonsumsi energi listrik sekitar seperlimanya saja.

6. Urusan Pilihan Industri dan Perdagangan

Berdasarkan data kontribusi PDRB Provinsi Banten tahun 2015, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar 33,48%. Berdasarkan harga konstan 2010, Pada tahun 2015, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kepada kelompok sektor sekunder yakni sebesar Rp134,33 Triliun.

Secara keseluruhan, industri di Provinsi Banten baik berskala besar dan sedang maupun mikro dan kecil mengalami pertumbuhan produksi yang positif. Hal ini pun memberikan pengaruh yang positif kepada peningkatan nilai tambah industri yang kemudian berdampak pada peningkatan PDRB Provinsi Banten. Tahun 2015 sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 3,30%.

Pada sektor perdagangan, kontribusi PDRB Provinsi Banten pada Tahun 2015, memberikan kontribusi terbesar kedua yakni sebesar 12,08%.

7. Urusan Pilihan Pariwisata

Pada tahun 2015, di Provinsi Banten terdapat 138 lokasi wisata tirta, 86 wisata marina pantai, 79 wisata sejarah, 6 suaka alam dan 147 wisata lainnya. Selain itu terdapat 4 museum, 26 situs purbakala, 120 bangunan bersejarah, dan 232 makam sejarah. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata, sepanjang tahun 2015 terdapat 14.243.949 wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata di Provinsi Banten, yang terdiri dari 14.118.787 wisatawan nusantara dan 125.162 wisatawan mancanegara.

Pada tahun 2015 terdapat 311 hotel (berbintang dan non bintang) di Provinsi Banten yang menyediakan 10.681 kamar dan 16.057 tempat tidur. Hotel tersebut digunakan oleh tamu asing maupun tamu domestik dengan rata-rata lama menginap selama 2,03 hari untuk tamu asing dan 1,70 hari untuk tamu domestik. Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel selama tahun 2015 adalah 52,87 persen untuk hotel berbintang dan 36,83 persen untuk hotel non bintang.

8. Investasi

Banten menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia, dengan total nilai investasi yang masuk setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Banten pada tahun 2015 mencapai 10,70 triliun

rupiah. Sedangkan realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2015 mencapai 2,54 miliar USD.

Selama periode Desember 2014-Juni 2016, peranan sektor perbankan bagi perekonomian Banten telah meningkat pesat. Kondisi ini terlihat dengan bertambahnya pangsa pasar perbankan, terutama jumlah nasabah. Dana perbankan yang berhasil dihimpun dari masyarakat juga meningkat hingga menjadi 144 triliun rupiah. Adapun pinjaman yang disalurkan oleh kalangan perbankan untuk lokasi proyek di Banten, sampai Juni 2016 mencapai 252 triliun rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan posisi Desember tahun 2014 dan 2015. Operasional perbankan sendiri, didukung oleh asset yang terus meningkat hingga mencapai 169 triliun rupiah pada Juni 2016.

Selain sebagai daerah penyangga bagi Ibukota DKI Jakarta, Banten juga memiliki berbagai fasilitas infrastruktur strategis, antara lain pelabuhan Merak dan Cigading, Bandara Soekarno-Hatta dan Jalan Tol Jakarta-Merak, serta memiliki akses yang sangat mudah menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Oleh karena itu, Banten menjadi salah satu daerah utama tujuan investasi di Indonesia, dengan nilai investasi yang terus bertambah. Realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Banten sendiri pada tahun 2015 menduduki peringkat keenam di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 10,7 triliun rupiah. Adapun realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun yang sama mencapai 2,5 miliar US\$, sehingga menduduki peringkat keempat tertinggi se-Indonesia.